



# LAPORAN

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PERUM BULOG  
TAHUN 2025**



**TRANSPARANSI UNTUK KETAHANAN  
PANGAN YANG BERKELANJUTAN**

*"Keterbukaan Informasi Menjadi Penggerak Sinergi  
dan Nilai Tambah di Seluruh Ekosistem BULOG"*

## Daftar Isi

Daftar Isi	2
Daftar Gambar dan Tabel	2
Pengantar Laporan	3
Kebijakan dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi	5
Strategi Perum BULOG dalam Memenuhi Hak Akses Informasi Publik	10
Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Ketahanan Pangan	13
Sarana, Inovasi, dan Sinergi Komunikasi Publik	17
Anggaran Layanan Informasi dan Pemanfaatan Sumber Daya	22
Hasil dan Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025	24
Evaluasi, Kendala, dan Rekomendasi Pengembangan PPID	29

## Daftar Gambar

Gambar 1. Arah pembangunan nasional melalui Visi Indonesia dan Asta Cita Pemerintah	5
Gambar 2. Rapat evaluasi layanan informasi publik berkala bersama perangkat PPID dan pendukung Perum BULOG	6
Gambar 3. Struktur PPID Perum BULOG	8
Gambar 4. Edukasi publik melalui informasi titik penyaluran SPHP dan larangan memperjualbelikan kemasan beras BULOG	11
Gambar 5. Program konsinyering antar divisi untuk pemenuhan MONEV dan pengembangan inovasi PPID	11
Gambar 6. Publikasi pengawasan mutu berlapis untuk menjaga kualitas beras	13
Gambar 7. Publikasi kinerja dan penyaluran bantuan pangan pada media sosial	14

Gambar 8. Keterbukaan informasi pada website PT Jasa Prima Logistik	15
Gambar 9. Informasi publik dan formulir permintaan informasi pada website PT Gendhis Multi Manis	15
Gambar 10. Tampilan website ppid.bulog.co.id	17
Gambar 11. Area layanan informasi langsung di lobby kantor pusat Perum BULOG	17
Gambar 12. Tampilan aplikasi mobile PPID BULOG	18
Gambar 13. Video sosialisasi partisipasi karyawan dalam implementasi keterbukaan informasi perusahaan	19
Gambar 14. Kolaborasi komunikasi bersama media massa dan Kantor Komunikasi Kepresidenan	20
Gambar 15. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang terbuka bagi publik pada website ppid.bulog.co.id	27
Gambar 16. Publikasi laporan layanan informasi publik Perum BULOG tahun 2024 pada website ppid.bulog.co.id	27
Gambar 17. Direktur Utama menerima penghargaan Top 10 BUMN Informatif tahun 2025 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik	28
<b>Daftar Grafik</b>	
Grafik 1. Grafik perbandingan jumlah permintaan informasi publik tahun 2024 dan 2025 (s.d Agustus)	24
Grafik 2. Grafik jumlah permintaan informasi publik periode januari s.d agustus 2025 berdasarkan jenis pemohon	24
Grafik 3. Jumlah permintaan informasi publik periode januari s.d agustus 2025 berdasarkan jenis informasi	25
Grafik 4. Perbandingan waktu dalam memenuhi permintaan informasi tahun 2024 dan 2025	25

## PENGANTAR LAPORAN

Keterbukaan informasi publik menjadi fondasi bagi Perum BULOG dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan penugasan pemerintah disampaikan melalui data yang jelas, akurat, dan mudah diakses. Melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), fungsi yang bertanggung jawab mengelola dan menyediakan informasi publik BULOG, memperkuat tata kelola informasi sepanjang 2025 melalui pembaruan dokumen layanan, penyeragaman klasifikasi informasi, konsinyering lintas divisi, serta peningkatan sarana layanan baik langsung maupun digital. Inovasi layanan turut diperluas melalui penyempurnaan website dan aplikasi mobile PPID, video layanan berbahasa isyarat, serta penguatan Whistleblowing System.

Komitmen tersebut menghasilkan capaian yang terukur. Perum BULOG berhasil meraih predikat Informatif selama dua tahun berturut-turut dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Pada tahun 2025, Perum BULOG masuk dalam Top 10 BUMN Paling Informatif dengan perolehan nilai 98,45, yang mencerminkan konsistensi perusahaan dalam memenuhi standar keterbukaan informasi publik nasional serta peningkatan kualitas layanan informasi secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat produksi dan stabilisasi pangan nasional, Perum BULOG terus menjalankan mandat strategisnya. Hingga 19 November 2025, pengadaan beras mencapai 3,1 juta ton

atau 103,5% dari target, sementara serapan jagung mencapai 97,1 ribu ton dan terus meningkat seiring ritme produksi nasional. Capaian ini menegaskan bahwa stabilisasi pangan membutuhkan dukungan data yang terbuka dan terverifikasi agar publik dan pemangku kepentingan memperoleh dasar informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang tahun 2025, sinergi komunikasi publik di seluruh lini Perum BULOG semakin diperkuat melalui kolaborasi antara PPID pusat, kantor wilayah, dan anak perusahaan. Konsinyering rutin, pengelolaan konten terkoordinasi, serta pemanfaatan media sosial sebagai media komunikasi yang cepat dan responsif menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Melalui laporan ini, Perum BULOG menyajikan capaian, inovasi, serta penguatan tata kelola layanan informasi publik sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan layanan informasi yang akurat, inklusif, dan mudah diakses untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Jakarta, 31 Desember 2025

Atasan PPID  
Arwakhudin Widiarso  
(Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan)

## Kebijakan dan Tata Kelola Keterbukaan Informasi





# KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

## A. Gambaran Umum dan Dasar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Perum BULOG merupakan bagian penting dari tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai BUMN dengan mandat strategis menjaga stabilitas pangan nasional, Perum BULOG memandang pengelolaan informasi bukan sekadar pemenuhan regulasi, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Pelayanan informasi publik di lingkungan Perum BULOG dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta ketentuan internal melalui

Pedoman Pelayanan Informasi Publik Perum BULOG Nomor PD-36/DUI00/09/2024. Kerangka regulatif tersebut memastikan bahwa proses pengelolaan, penyediaan, dan publikasi informasi dilakukan secara akurat, relevan, konsisten, dan mudah diakses.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan penguatan produksi domestik dan stabilisasi harga, Perum BULOG memastikan bahwa informasi terkait program penugasan pemerintah, mulai dari pengadaan beras dan jagung, penyerapan gabah petani, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga Bantuan Pangan dipublikasikan secara terbuka di berbagai media perusahaan. Transparansi data menjadi krusial mengingat tingginya perhatian publik terhadap kondisi pangan nasional serta kebutuhan akan informasi yang jelas, faktual, dan bebas dari misinformasi.



Gambar 1. Arah pembangunan nasional melalui Visi Indonesia dan Asta Cita Pemerintah



## B. Pembaruan Tata Kelola Layanan Informasi Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, Perum BULOG melakukan penyempurnaan tata kelola layanan informasi agar selaras dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan publik. Pembaruan tersebut meliputi:

1. Penetapan Struktur PPID melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: SP.177/DS101/SM.05.01/08/2025, yang memastikan fungsi pengelolaan komunikasi di seluruh kantor wilayah juga berjalan seragam dan terkoordinasi;
2. Penerbitan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui Penetapan Atasan PPID Nomor: 001/PPID-BULOG/09/2025;



Gambar 2. Rapat evaluasi layanan informasi publik berkala bersama perangkat PPID dan pendukung Perum BULOG

3. Pembaruan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (DIK) melalui Penetapan Nomor: 002/PPID-BULOG/09/2025; serta
4. Penyempurnaan SOP Pelayanan Informasi Publik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Penyusunan seluruh dokumen tersebut dilakukan melalui forum koordinasi bersama Tim Pertimbangan dan unit-unit terkait untuk memastikan bahwa setiap ketentuan, alur layanan, dan standar verifikasi informasi tetap relevan, selaras dengan kebutuhan operasional, serta sesuai prinsip transparansi.

## Visi, Misi, dan Struktur PPID Perum BULOG

### Visi

“Mewujudkan layanan informasi yang inovatif, transparan, dan kolaboratif yang mengedepankan kecepatan, akurasi, dan keterjangkauan untuk meningkatkan nilai perusahaan.”

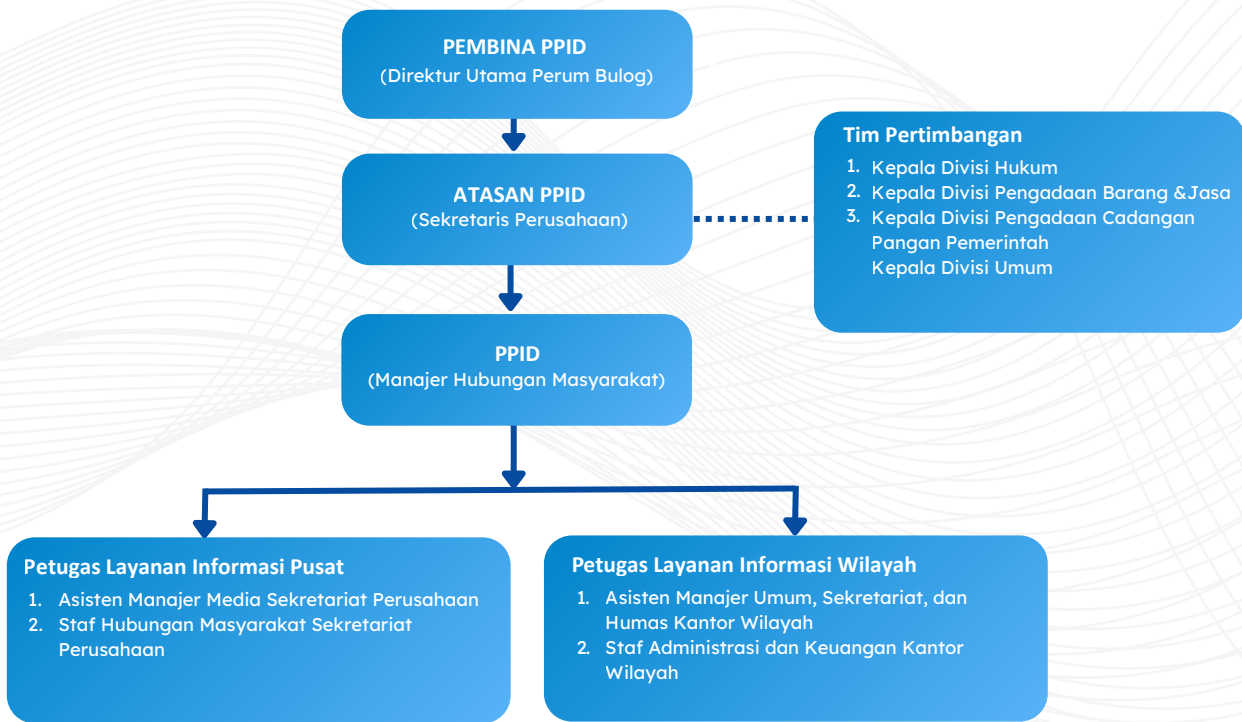


## Misi

1. Menyelenggarakan layanan informasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Senantiasa menghadirkan kemudahan dan keandalan dalam layanan
3. informasi baik secara langsung maupun melalui platform digital.
4. Menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya melalui standar verifikasi dan validasi informasi serta pembaruan berkala.
5. Mengadakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan SDM.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi.

Struktur PPID Perum BULOG dibentuk agar layanan informasi publik dapat berjalan dengan jelas dan terkoordinasi. Pembina PPID, yaitu Direktur Utama memberikan arahan dan memastikan prinsip keterbukaan dijalankan di seluruh perusahaan. Fungsi pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Atasan PPID (Sekretaris Perusahaan), yang mengoordinasikan pengelolaan informasi lintas divisi hingga kantor wilayah. Atasan PPID juga didukung Tim Pertimbangan dari Divisi Hukum, Pengadaan, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Divisi Umum untuk memberikan masukan saat terdapat informasi yang perlu dikaji sebelum diputuskan untuk dibuka atau dikecualikan.

Pelaksana utama layanan informasi adalah PPID yakni Manajer Hubungan Masyarakat. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, PPID didukung oleh Petugas Layanan Informasi Pusat yang menyusun pedoman, menangani permohonan informasi di tingkat kantor pusat, mengelola publikasi aksi-aksi korporasi, dan menyusun laporan layanan informasi perusahaan. Di sisi lain, Petugas Layanan Informasi Wilayah menyelenggarakan layanan informasi di daerah kerjanya masing-masing serta memastikan informasi dari aktivitas operasional di lapangan tersampaikan secara cepat dan akurat.



Gambar 3. Struktur PPID Perum BULOG

Melalui pembaruan kebijakan, penguatan struktur, peningkatan kapasitas, serta konsolidasi berkelanjutan, Perum BULOG membangun tata kelola keterbukaan informasi publik yang semakin matang dan responsif. Pendekatan ini tidak hanya

memastikan pemenuhan kewajiban regulatif, tetapi juga mendukung peran perusahaan sebagai pilar ketahanan pangan nasional yang terpercaya, transparan, dan melayani publik secara optimal.

**Strategi Perum BULOG dalam  
Memenuhi Hak Akses Informasi Publik**

# LAYANAN INFORMASI PUBLIK PERUM BULOG





# STRATEGI PERUM BULOG DALAM MEMENUHI HAK AKSES INFORMASI PUBLIK

Dalam rangka memastikan terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik, Perum BULOG menerapkan strategi pelayanan informasi yang terintegrasi, adaptif terhadap perkembangan organisasi, serta selaras dengan mandat stabilisasi pangan nasional. Strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai kebutuhan publik mulai dari transparansi data pangan, respons isu strategis, digitalisasi layanan, hingga konsistensi informasi di seluruh BULOG Group. Strategi tersebut mencakup:

## 1. Digitalisasi Layanan PPID yang Terintegrasi

Perum BULOG terus memperkuat media layanan melalui pengembangan website khusus PPID dan aplikasi mobile yang menyediakan fitur permintaan informasi, formulir keberatan, pelacakan informasi publik yang lengkap dan terkini, serta panduan layanan yang ramah difabel.

## 2. Koordinasi dan Pengawasan Berkala

Untuk menjamin konsistensi data-data perusahaan, koordinasi dilakukan secara terstruktur dan berkala antara PPID Pusat, pengelola informasi di kantor wilayah dan anak perusahaan, serta unit-unit internal terkait. Mekanisme pengawasan ini memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan ke publik telah melalui proses verifikasi, mengikuti standar pelayanan informasi, dan sesuai dengan klasifikasi informasi yang berlaku.

## 3. Integrasi Komunikasi Publik dengan Strategi Korporasi

Pelayanan informasi publik diintegrasikan dengan strategi komunikasi Perum BULOG

melalui publikasi capaian kinerja, diseminasi data pangan terkini, klarifikasi terhadap isu strategis, serta penyampaian kebijakan pemerintah dalam sektor pangan. Pemanfaatan media digital seperti website, media sosial, aplikasi mobile, siaran pers, dan konten video memastikan pesan perusahaan tersampaikan secara lebih luas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

## 4. Kolaborasi Lintas Divisi melalui Konsinyering

Perum BULOG mengembangkan pola kerja kolaboratif melalui program konsinyering keterbukaan informasi yang melibatkan divisi-divisi lain, khususnya yang terkait dengan teknologi informasi, hukum, hingga pengadaan. Proses ini memastikan bahwa setiap pengembangan inovasi PPID hingga publikasi informasi diselaraskan dengan data resmi, perkembangan di lapangan, serta kebijakan terkini perusahaan sebelum diumumkan ke publik.

## 5. Peningkatan Literasi dan Kompetensi Pengelola Informasi Publik

Perum BULOG terus meningkatkan kapasitas pengelola informasi publik melalui rapat koordinasi, konsinyering, dan pelatihan bersama. Kegiatan ini mencakup pemahaman akan regulasi, teknis pelayanan informasi, pengelolaan konten digital, pelatihan jurnalistik, hingga penguatan komunikasi publik. Selain itu, Perum BULOG juga membangun kolaborasi dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian, TNI, POLRI, BUMN, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait lainnya untuk



menyelaraskan standar layanan, berbagi praktik terbaik, serta meningkatkan kualitas tata kelola informasi publik secara menyeluruh.

Dengan strategi yang adaptif, kolaboratif,

dan berbasis data, Perum BULOG menempatkan keterbukaan informasi sebagai pendorong sinergi perusahaan, efektivitas penugasan pemerintah, dan kepercayaan publik.



Gambar 4. Edukasi publik melalui informasi titik penyaluran SPHP dan larangan memperjualbelikan kemasan beras BULOG



Gambar 5. Program konsinyering antardivisi untuk pemenuhan MONEV dan pengembangan inovasi PPID

## Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Ketahanan Pangan





## KETERBUKAAN INFORMASI SEBAGAI PILAR KETAHANAN PANGAN

Keterbukaan informasi publik di Perum BULOG bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi pilar strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sebagai BUMN yang memegang mandat stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, setiap kebijakan, keputusan operasional, dan capaian perusahaan berdampak langsung pada masyarakat. Karena itu, transparansi menjadi instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas, mencegah disinformasi, serta memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan fungsi stabilisasi harga dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), publik membutuhkan akses terhadap data yang akurat, mulai dari serapan gabah atau beras, kondisi stok, realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), hingga langkah antisipatif menghadapi gejolak harga. Publikasi data secara berkala oleh PPID bersama unit teknis memastikan bahwa Perum BULOG

menyampaikan informasi berbasis fakta lapangan. Informasi ini menjadi rujukan penting bagi pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, media, serta masyarakat untuk memahami situasi pangan secara objektif.

Transparansi proses juga berperan besar dalam memperkuat kepercayaan publik. Penjelasan terbuka mengenai mekanisme penyaluran SPHP, pelaksanaan penugasan pemerintah, program TJSL Pangan Murah dan lainnya, hingga kerja sama dengan petani, mitra penggilingan, serta mitra terkait lainnya membantu masyarakat melihat bagaimana Perum BULOG menjaga kelancaran rantai pasok nasional. Publikasi operasional melalui media digital, layanan PPID, serta pemberitaan media massa turut memperluas dampak sosial program sekaligus meminimalkan potensi misinformasi.



Gambar 6. Publikasi pengawasan mutu berlapis untuk menjaga kualitas beras



Selain itu, keterbukaan informasi juga mendukung pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis perusahaan, termasuk kinerja stok, realisasi penugasan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan PPID sebagai pengendali mutu informasi, didukung oleh standar layanan yang terukur dan infrastruktur digital yang semakin matang, Perum BULOG mampu menyediakan informasi yang konsisten, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan..

Melalui penguatan transparansi yang terintegrasi, baik melalui PPID, publikasi digital, maupun sinergi komunikasi lintas unit, Perum BULOG menempatkan keterbukaan informasi sebagai fondasi penting ketahanan pangan nasional. Pilar ini memastikan bahwa seluruh kebijakan dan langkah operasional berlangsung secara terbuka, kredibel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.



Gambar 7. Publikasi kinerja dan penyaluran bantuan pangan pada media sosial

### Peningkatan Akses Informasi Anak Perusahaan

Selain itu, keterbukaan informasi juga mendukung pengawasan publik terhadap pelaksanaan program strategis perusahaan, termasuk kinerja stok, realisasi penugasan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan PPID sebagai pengendali mutu

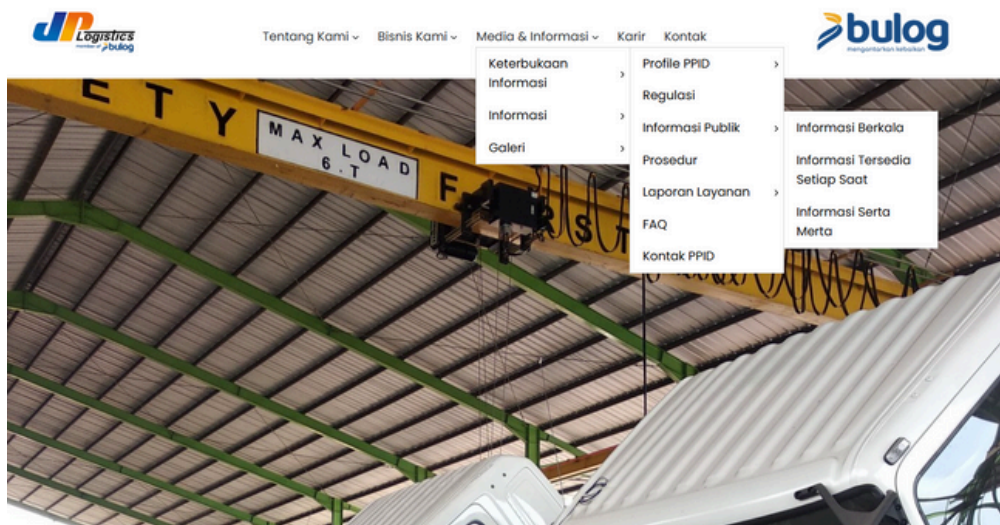
informasi, didukung oleh standar layanan yang terukur dan infrastruktur digital yang semakin matang, Perum BULOG mampu menyediakan informasi yang konsisten, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain melalui website, kedua anak perusahaan juga memperkuat transparansi



melalui publikasi di media sosial mengenai kegiatan operasional, program strategis, dan layanan yang berjalan. Setiap pembaruan informasi digital tersebut dilaporkan secara berkala kepada PPID pusat sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi. Anak perusahaan melaksanakan layanan informasi berdasarkan pedoman dari kantor pusat, sekaligus memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan standar layanan agar lebih sesuai dengan kondisi operasional di lapangan.

Upaya peningkatan akses informasi ini turut diperkuat melalui keikutsertaan anak perusahaan dalam rapat koordinasi PPID yang dilaksanakan secara berkala. Forum ini membantu penyelarasan kebijakan, pemutakhiran informasi publik, serta konsistensi narasi publik antara pusat, wilayah, dan anak perusahaan. Dengan partisipasi aktif tersebut, tata kelola keterbukaan informasi di seluruh BULOG Group dapat berjalan lebih efektif.



Gambar 8. Keterbukaan informasi pada website PT Jasa Prima Logistik

**Informasi Berkala PPID**

NO	INFORMASI	LINK
1	Tugas dan fungsi pokok perusahaan	<a href="#">INFO</a>
2	Maksud dan tujuan pendirian perusahaan	<a href="#">INFO</a>
3	Informasi jenis kegiatan usaha	<a href="#">INFO</a>
4	Jangka waktu pendirian perusahaan	<a href="#">INFO</a>
5	Permodalan perusahaan	<a href="#">INFO</a>
6	Pemegang saham perusahaan	<a href="#">INFO</a>
7	Dewan Direksi	<a href="#">INFO</a>
8	Dewan Komisaris	<a href="#">INFO</a>
9	LHKPN pimpinan tertinggi perusahaan	<a href="#">INFO</a>
10	LHKPN pejabat struktural	<a href="#">INFO</a>
11	Hasil penilaian oleh auditor eksternal & lembaga pemeringkat	<a href="#">INFO</a>
12	Sistem alokasi dan remunerasi Direksi dan Komisaris	<a href="#">INFO</a>

**Formulir Permintaan Informasi**

Formulir Permintaan Informasi

**Nama Lengkap \***

**Nomor KTP / SIM \***

**Alamat \***

**No Telepon \***

**Email \***

**Informasi Yang Dibutuhkan \***

Gambar 9. Informasi publik dan formulir permintaan informasi pada website PT Gendhis Multi Manis

# Sarana, Inovasi, dan Sinergi Komunikasi Publik





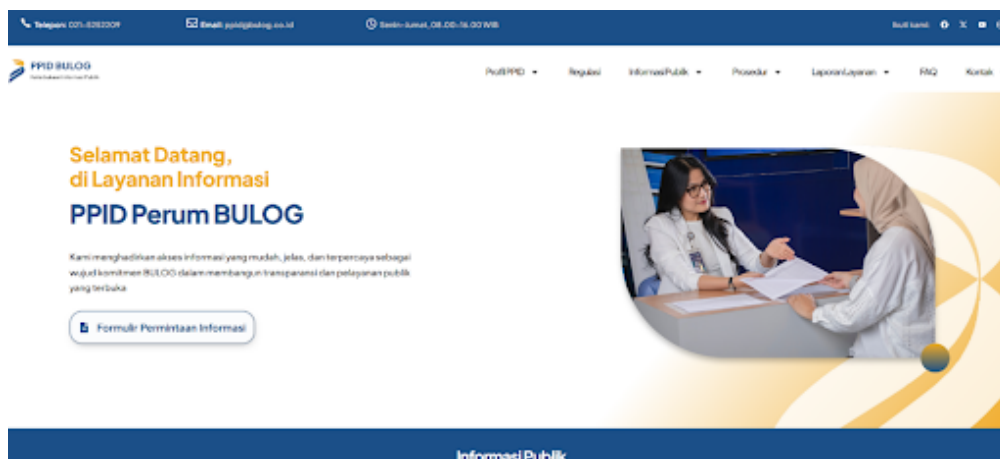
# SARANA, INOVASI, DAN SINERGI KOMUNIKASI PUBLIK

## 1. Penguatan Sarana Layanan Informasi Publik

Perum BULOG menyediakan sarana layanan informasi publik yang lengkap, terstandar, dan mudah diakses melalui layanan langsung dan digital. Layanan langsung yang berlokasi di lobby kantor pusat dilengkapi area pelayanan yang nyaman, petugas khusus PPID, TV display untuk informasi layanan, serta formulir permohonan dan pengajuan keberatan informasi. Fasilitas ini memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi

secara langsung dengan alur yang jelas dan didampingi petugas.

Sementara itu, layanan digital melalui website [ppid.bulog.co.id](http://ppid.bulog.co.id) dan aplikasi PPID BULOG yang tersedia di perangkat iOS dan Android memungkinkan publik mengakses informasi secara mandiri, mulai dari Informasi Publik, prosedur layanan, pengajuan permohonan dan keberatan, hingga publikasi data berkala. Media digital ini menghadirkan akses yang cepat, efisien, dan dapat digunakan dimanapun.



Gambar 10. Tampilan website [ppid.bulog.co.id](http://ppid.bulog.co.id)



Gambar 11. Area layanan informasi langsung di lobby kantor pusat Perum BULOG

## 2. Inovasi Digital dan Non-Digital untuk Akses Informasi

Dalam upaya memperkuat transparansi dan memperluas jangkauan keterbukaan informasi, Perum BULOG terus berinovasi digital serta memperdalam kolaborasi komunikasi publik lintas entitas. Pada aspek digitalisasi, perusahaan telah melakukan sejumlah pembaruan signifikan yang meningkatkan kemudahan akses dan memastikan layanan informasi publik yang lebih cepat dan akurat.

Website PPID BULOG kini berfungsi sebagai media khusus yang menyajikan informasi publik secara lengkap, akurat, dan mudah diakses. Sebelumnya, konten keterbukaan informasi masih tergabung di website utama. Dengan adanya website khusus [ppid.bulog.co.id](http://ppid.bulog.co.id), seluruh informasi publik, mulai dari Daftar Informasi Publik (DIP), prosedur layanan, formulir permohonan dan keberatan, hingga publikasi resmi kini lebih terstruktur. Website ini juga dilengkapi video layanan dengan penerjemah bahasa isyarat untuk mendukung penyampaian informasi yang lebih inklusif.

Selain itu, Aplikasi Mobile PPID BULOG turut diperbarui untuk menghadirkan pengalaman penggunaan yang lebih intuitif dan terintegrasi. Melalui aplikasi ini,

masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi, mengajukan keberatan, memantau status permohonan, serta memperoleh pembaruan informasi secara real time. Peningkatan tampilan dan fungsionalitas aplikasi dirancang untuk menjawab kebutuhan publik akan layanan PPID yang dapat diakses kapan saja melalui perangkat mobile.

Pembaruan juga dilakukan pada website Whistleblowing System (WBS). Penyempurnaan mencakup penyederhanaan alur pelaporan, penyediaan formulir yang lebih ringkas dan ramah pengguna, serta penambahan fitur pemantauan status laporan. Dengan demikian, pelapor dapat menyampaikan dugaan pelanggaran secara lebih mudah, aman, dan terpantau.

Pada aspek pengelolaan publikasi, Perum BULOG memperkuat keterbukaan informasi pengadaan dan keuangan melalui mekanisme konsinyering lintas divisi, sehingga setiap data yang akan dipublikasikan telah melalui verifikasi berlapis. Proses ini memastikan informasi yang disajikan kepada publik sudah selaras, akurat, dan konsisten antara pusat dan wilayah, serta meminimalisasi risiko kekeliruan data.



Gambar 12. Tampilan aplikasi mobile PPID BULOG



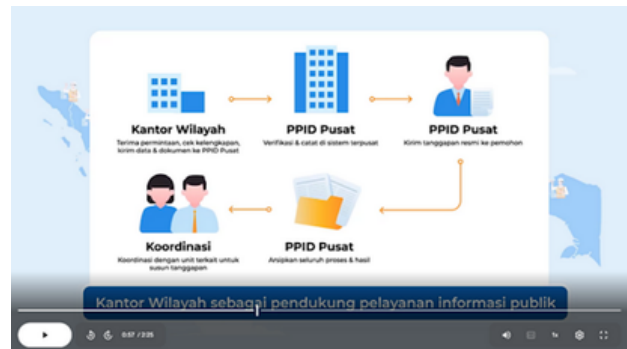
### 3. Sinergi Komunikasi Publik Lintas Unit dan Pemangku Kepentingan

Perum BULOG memperkuat sinergi komunikasi publik sebagai bagian penting dari perluasan jangkauan informasi strategis kepada masyarakat. Selama periode Januari hingga Oktober 2025, Perum BULOG menghasilkan 25 konten kolaboratif bersama instansi pemerintah dan mitra terkait lainnya. Kolaborasi ini mencakup publikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), informasi penyaluran Bantuan Pangan, campaign stabilisasi harga dan pasokan, serta komunikasi terpadu mengenai kegiatan penyerapan gabah di berbagai wilayah. Melalui kerja sama ini, pesan strategis dapat disampaikan secara lebih luas, seragam, dan berdampak.

Sinergi lintas pemangku kepentingan juga memperkuat posisi Perum BULOG sebagai sumber informasi yang terpercaya dalam isu pangan nasional. Koordinasi antara PPID,

divisi operasional, kantor wilayah, dan instansi mitra memastikan setiap publikasi memiliki data yang terverifikasi serta narasi yang konsisten antara pusat dan wilayah. Pendekatan ini mengurangi potensi miskomunikasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi resmi terkait program SPHP, pengendalian inflasi pangan, maupun jaminan pasokan.

Lebih jauh, kolaborasi komunikasi publik ini menjadi pelengkap dari inovasi digital yang sedang dijalankan. Dengan menggabungkan publikasi digital, koordinasi lintas unit, serta kerja sama eksternal, Perum BULOG berhasil meningkatkan ekosistem komunikasi yang lebih adaptif dan responsif. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi informasi publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada keterlibatan mitra strategis dan konsistensi penyampaian informasi di lingkungan BULOG Group.



Gambar 13. Video sosialisasi partisipasi karyawan dalam implementasi keterbukaan informasi perusahaan



Gambar 14. Kolaborasi komunikasi bersama media massa dan Kantor Komunikasi Kepresidenan

# Anggaran Layanan Informasi dan Pemanfaatan Sumber Daya





# ANGGARAN LAYANAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Anggaran layanan informasi di Perum BULOG dioptimalkan untuk mendukung penyelenggaraan PPID secara menyeluruh, mencakup pengembangan dan pemeliharaan sistem digital, penyediaan sarana layanan langsung, koordinasi internal, serta publikasi informasi publik. Alokasi anggaran ini memastikan layanan PPID dapat berjalan stabil, terukur, dan memenuhi standar keterbukaan informasi nasional.

Sebagian kebutuhan pengelolaan informasi juga didukung melalui pembiayaan silang antarunit, terutama untuk program yang memerlukan dukungan teknis lintas divisi. Misalnya, pengembangan dan pemeliharaan website PPID, aplikasi mobile, dan Whistleblowing System.

Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan melalui kolaborasi antara PPID, Divisi Teknologi Informasi, unit komunikasi, serta Tim Pertimbangan. Kolaborasi ini mencakup verifikasi data, pemutakhiran informasi, konsinyering pemenuhan indikator keterbukaan informasi, serta penanganan permohonan informasi hingga penyelesaian keberatan. Perpaduan antara alokasi anggaran, pendanaan silang antarunit, dan optimalisasi sumber daya internal memungkinkan Perum BULOG menghadirkan layanan informasi publik yang responsif, konsisten, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

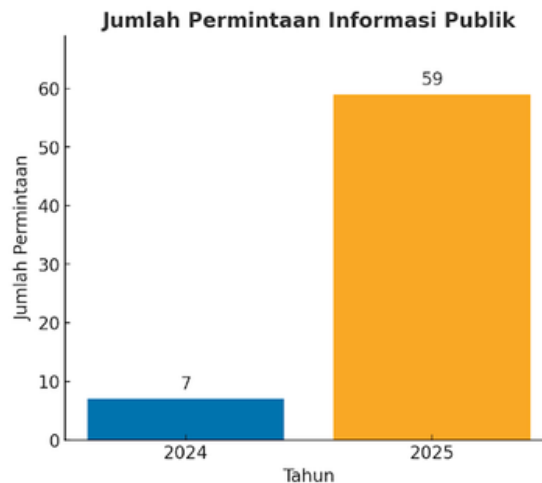


## **Hasil dan Capaian Layanan Informasi Publik Tahun 2025**



# HASIL DAN CAPAIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

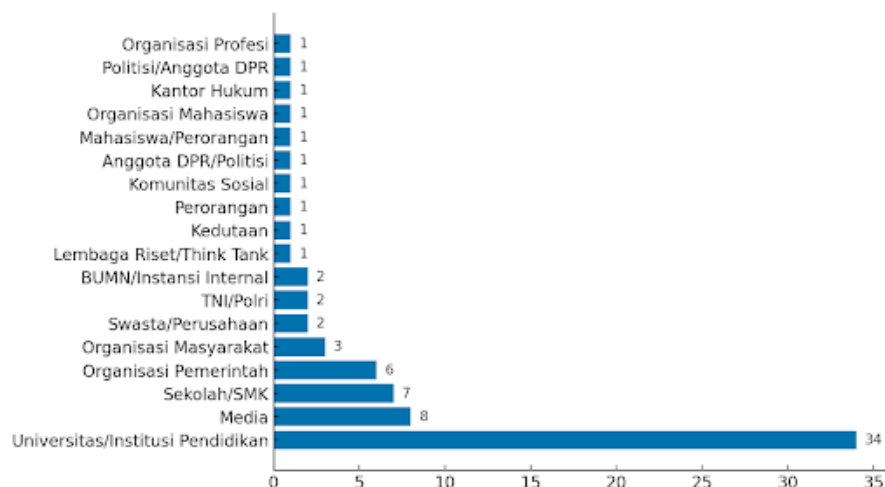
## 1. Jumlah Permintaan Informasi yang Diterima



Grafik 1. Perbandingan jumlah permintaan informasi publik tahun 2024 dan 2025. (s.d Agustus)

Grafik menunjukkan adanya peningkatan signifikan jumlah permintaan informasi publik yang masuk ke PPID dari tahun 2024 ke tahun 2025. Pada tahun 2024 tercatat hanya 7 permintaan, sementara hingga Agustus 2025 jumlahnya melonjak menjadi 59 permintaan. Peningkatan ini

mencerminkan semakin tingginya perhatian dan kebutuhan berbagai pihak terhadap data serta layanan informasi yang disediakan PPID. Hal ini sekaligus menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan publik terhadap mekanisme keterbukaan informasi yang dijalankan perusahaan.



Grafik 2. Jumlah permintaan informasi publik periode januari s.d agustus 2025 berdasarkan jenis pemohon

Grafik memperlihatkan distribusi permintaan informasi publik ke PPID selama Januari hingga Agustus 2025 menurut jenis pemohon. Dari total 59 permintaan, mayoritas berasal dari universitas dan institusi pendidikan, diikuti oleh organisasi pemerintah, media massa, serta sekolah/SMK. Sementara itu, permintaan

juga datang dari pihak swasta/perusahaan, organisasi masyarakat, politisi, komunitas sosial, hingga individu perorangan. Keragaman asal pemohon ini menunjukkan bahwa layanan informasi publik PPID dimanfaatkan secara luas oleh berbagai kalangan, baik akademisi, lembaga negara, dunia usaha, maupun masyarakat umum.

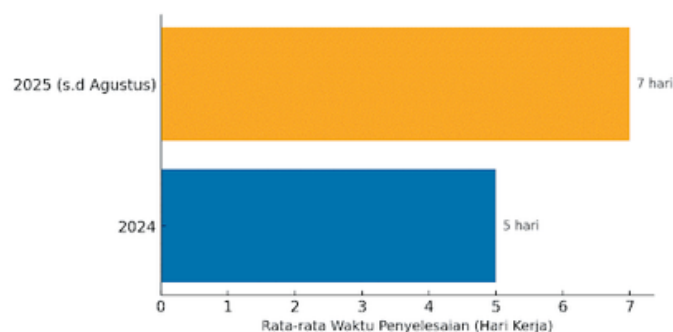


Grafik 3. Jumlah permintaan informasi publik periode Januari s.d Agustus 2025 berdasarkan jenis informasi

Sesuai grafik di atas, kategori Data & Riset Akademik mendominasi jenis informasi yang diminta, yang menunjukkan tingginya kebutuhan kalangan akademisi terhadap data perusahaan untuk kepentingan penelitian, riset, maupun kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, permintaan terkait Program & Kebijakan Perusahaan juga menempati porsi signifikan, mencerminkan perhatian publik pada arah kebijakan serta capaian program strategis.

Permintaan lainnya terbagi ke dalam kategori Kerjasama & Audiensi, Media & Publikasi, serta Sosialisasi & Kegiatan Organisasi, sementara sebagian kecil masuk kategori Lain-lain. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi PPID tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan akademis, tetapi juga mendukung kebutuhan praktis dunia usaha, media, serta masyarakat luas.

## 2. Waktu dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi



Grafik 4. Perbandingan waktu dalam memenuhi permintaan informasi tahun 2024 dan 2025



Grafik di atas memperlihatkan rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID dalam menindaklanjuti permintaan informasi publik pada tahun 2024 dan periode Januari s.d Agustus 2025. Pada tahun 2024, tercatat 7 permintaan informasi dengan rata-rata penyelesaian sekitar 5 hari kerja. Sementara itu, pada tahun 2025 jumlah permintaan meningkat menjadi 59 permintaan, dengan rata-rata waktu tindak lanjut sekitar 7 hari kerja.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun volume permintaan bertambah signifikan, seluruh permintaan tetap dapat dipenuhi dalam rentang standar layanan 3 sampai 7 hari kerja. Hal ini mencerminkan konsistensi PPID Perum BULOG dalam menjaga kualitas layanan dan memastikan setiap pemohon memperoleh informasi secara tepat waktu.

### 3. Pembaruan Regulasi, Daftar Informasi Publik, dan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

#### a. Pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan SOP Layanan Informasi

Perum BULOG melakukan penyempurnaan Daftar Informasi Publik dan pembaruan prosedur layanan. Pemutakhiran dilakukan melalui koordinasi lintas unit untuk memastikan seluruh informasi yang wajib diumumkan telah terinventarisasi, diverifikasi, dan dipublikasikan dalam format yang mudah diakses publik.

#### b. Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan

Perum BULOG juga telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang memiliki potensi pengecualian. Proses ini melibatkan analisis terhadap potensi

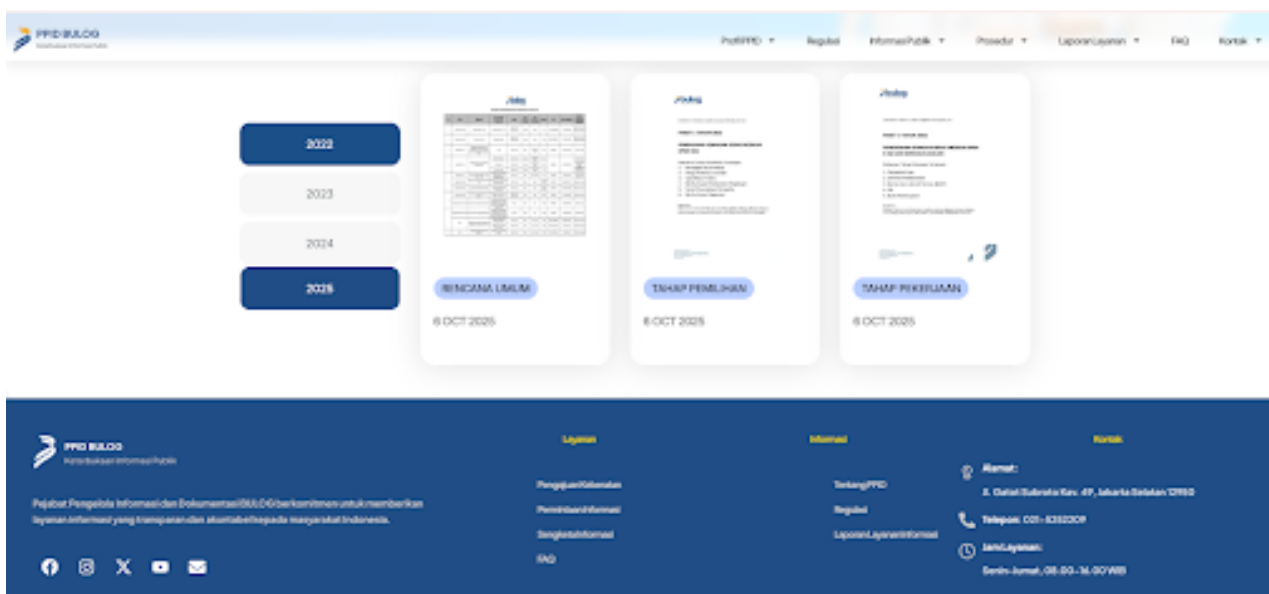
dampak apabila informasi dibuka, relevansi dengan kepentingan publik, serta kesesuaian dengan regulasi keterbukaan informasi. Melalui mekanisme ini, PPID memastikan bahwa informasi yang tidak dapat dipublikasikan memiliki dasar yang sah, jelas, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Peningkatan Akses Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa

Perum BULOG meningkatkan transparansi terhadap dokumen pengadaan melalui website [ppid.co.id](http://ppid.co.id). Adapun informasi dan dokumen yang dapat diakses meliputi rencana umum pengadaan, tahapan pemilihan penyedia, paket yang sedang berjalan, hingga daftar kontrak yang terbuka menurut Undang-Undang.

Proses verifikasi dokumen dilakukan melalui konsinyering lintas divisi untuk memastikan bahwa seluruh informasi pengadaan telah dievaluasi sebelum dipublikasikan, sehingga kesesuaian data terjaga baik di pusat maupun wilayah.





Gambar 15. Dokumen pengadaan barang dan jasa yang terbuka bagi publik pada website ppid.bulog.co.id

### 5. Laporan Konsolidasi Layanan Informasi Publik BULOG Group

Perum BULOG menyusun Laporan Konsolidasi Layanan Informasi Publik yang memuat gambaran kebijakan layanan informasi, tata kelola, capaian kinerja, serta kendala dan rekomendasi perbaikan yang akan ditindaklanjuti perusahaan. Laporan ini merupakan hasil pengumpulan data dan kegiatan layanan informasi dari PPID pusat, kantor wilayah, dan anak perusahaan, sehingga menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi secara menyeluruh di seluruh BULOG Group.

Dokumen disusun secara periodik sesuai Standar Layanan Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021, yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Laporan konsolidasi ini menjadi dasar evaluasi tahunan, sekaligus memastikan seluruh entitas BULOG Group melaksanakan

keterbukaan informasi secara terukur, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.



Gambar 16. Publikasi laporan layanan informasi publik Perum BULOG tahun 2024 pada website ppid.bulog.co.id



## 6. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Perum BULOG menunjukkan peningkatan signifikan dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, Perum BULOG memperoleh nilai 30,20 dengan kategori tidak informatif. Melalui penguatan tata kelola PPID, pembenahan sarana layanan, peningkatan kualitas informasi publik, serta konsistensi konsinyering lintas unit, capaian

tersebut meningkat tajam pada tahun 2024 dengan perolehan nilai 95,07 dan kategori informatif. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai 98,45, menempatkan Perum BULOG pada peringkat ke-9 atau Top 10 BUMN Paling Informatif secara nasional. Peningkatan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Perum BULOG dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik melalui layanan informasi yang semakin berkualitas.



Gambar 17. Direktur Utama menerima penghargaan Top 10 BUMN Informatif tahun 2025 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

## **Evaluasi, Kendala, dan Rekomendasi Pengembangan PPID**





## KENDALA DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik di Perum BULOG sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi permintaan informasi, cakupan layanan, maupun respon atau tindak lanjut PPID. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan agar kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Salah satu kendala utama adalah belum adanya bank data terintegrasi yang menghimpun informasi dari pusat, wilayah, dan anak perusahaan, sehingga ketersediaan dan pembaruan data masih bervariasi, terutama untuk dokumen operasional dan data historis. Kondisi ini juga membuat proses verifikasi dan konsinyering memerlukan waktu lebih lama sebelum informasi dapat dipublikasikan. Di sisi lain, peningkatan jumlah permintaan informasi dari 7 permohonan pada 2024 menjadi 59 permohonan hingga Agustus 2025 turut menjadi tantangan PPID, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi internal yang lebih cepat, adaptif, dan terstandar agar kualitas layanan tetap terjaga dalam batas waktu yang ditetapkan.

Di sisi layanan digital, website PPID, aplikasi mobile, dan Whistleblowing System sudah berfungsi baik, tetapi sebagian pengguna masih membutuhkan panduan yang lebih sederhana terkait alur layanan dan navigasi. Hal ini terlihat dari masih adanya permohonan yang belum sesuai prosedur atau diajukan di luar kewenangan PPID, menunjukkan perlunya peningkatan literasi publik mengenai cara mengakses layanan informasi Perum BULOG.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, sejumlah langkah pengembangan dapat dilakukan. Penguatan koordinasi antarunit, terutama dalam integrasi data, pembaruan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Informasi yang Dikecualikan (DIK), serta konsinyering berkala perlu terus diprioritaskan agar informasi yang dipublikasikan tetap akurat dan selaras di seluruh BULOG Group. Optimalisasi sistem digital juga menjadi penting, termasuk evaluasi berkala terhadap penggunaan website, peningkatan kemudahan pencarian informasi, serta penambahan fitur-fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar layanan semakin inklusif.

Upaya edukasi publik juga perlu diperluas melalui konten informatif di media sosial maupun sosialisasi langsung di berbagai kegiatan pelayanan publik Perum BULOG. Penyampaian informasi yang konsisten dapat diperkuat melalui pedoman komunikasi internal yang menyatukan narasi publik, sehingga pesan yang disampaikan pusat dan wilayah selalu selaras, terutama terkait program stabilisasi pangan dan layanan PPID.

Melalui kombinasi antara peningkatan koordinasi, optimalisasi sistem digital, penguatan kompetensi internal, serta perluasan literasi publik, Perum BULOG dapat terus meningkatkan kualitas layanan keterbukaan informasi secara adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi fondasi penting menuju layanan PPID yang lebih responsif, akurat, dan terpercaya.



**Perum Bulog**

Gedung Bulog

Jl. Gatot Subroto No. Kav. 49, RT.5/RW.4, Kuningan,  
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950

**[www.ppid.bulog.co.id](http://www.ppid.bulog.co.id)**